

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bab ini, peneliti menjelaskan latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi dalam penyusunan skripsi.

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tujuan pembangunan suatu Negara pada hakikatnya dilaksanakan untuk menyejahterakan masyarakatnya, begitu juga dengan negara kita Indonesia. Pembangunan tersebut dinamakan pembangunan nasional yang mana berfungsi sebagai proses yang saling berkesinambungan dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah dalam setiap bidang kehidupan baik itu rakyat, bangsa maupun Negara untuk dapat mewujudkan tujuan nasional yang sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 disebutkan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka segala potensi yang ada harus dikembangkan, seperti potensi sumber daya manusia (SDM) yang harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menggali, memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam (SDA) secara maksimal.

Kualitas sumber daya manusia dari suatu negara merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan usaha percepatan pembangunan, sumber daya manusia (SDM) merupakan agen-agen pembangunan yang secara aktif dapat meningkatkan dan memberdayakan sumber daya alam (SDA) menuju ke arah yang lebih produktif. Maka dari itu, pemerintah perlu menyadari betapa pentingnya usaha pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui program-program yang sedang dan akan dilakukan (Soewartoyo, 2009, hlm. 62). Sementara sumber daya alam (SDA) merupakan faktor produksi yang harus dimanfaatkan secara efektif untuk kepentingan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia berkembang pesat. Berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia yang datanya bisa dilihat di website resmi BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 269,6 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 55,8 % bertempat tinggal di perkotaan dan 44,2 % bertempat tinggal di pedesaan. Jumlah penduduk Indonesia yang tidak jauh berbeda antara di kota dan di desa harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang tidak hanya terfokus di daerah pusat/kota saja, pembangunan di desa pun harus dilakukan agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan antara di desa dan di kota. Indonesia adalah Negara yang menganut asas desentralisasi, pemerintah pusat memberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu desa mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam mewujudkan pembangunan desa, maka diperlukan perhatian yang lebih dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga segenap aparat pemerintah desa. Potensi alam di desa harus digali, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya, juga potensi sumber daya manusia nya yang harus ditingkatkan baik itu melalui pengetahuan dan keterampilannya agar mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal (Rahayu, 2018, hlm. 2).

Adanya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa juga mengembangkan paradigma dan konsep baru mengenai kebijakan tata kelola desa secara nasional. Undang-undang ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena berada pada posisi sub nasional (Borni, 2015, hlm. 5). Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbagai program pemerintah baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bermunculan yang bertujuan untuk membangkitkan dan mendorong kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan.

Beberapa hal yang menjadi pendorong bagi banyak negara berkembang untuk meningkatkan perhatian pada pembangunan masyarakat pedesaan adalah (Ndraha, 1990, hlm. 82-83):

- 1) Bagian terbesar penduduk tinggal di daerah pedesaan yang taraf dan kondisi hidup mereka sangat rendah
- 2) Keadaan pedesaan yang di anggap timpang jika dibandingkan keadaan perkotaan
- 3). Kenyataan bahwa dalam pembangunan masyarakat (*Community Development*) pedesaan belum mampu mewujudkan prakarsa yang berarti

Masyarakat merupakan pelaku utama dalam pembangunan, dan pemerintah daerah harus menjadi fasilitator untuk menciptakan suasana yang mendukung berbagai kegiatan masyarakat yang tentunya diharapkan dapat mendukung tujuan pemerintah yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat (Ibran, 2018, hlm. 121). Maka dari itu pembangunan harus dimulai dari masyarakatnya yang berperan sebagai manusia yang paling mengetahui kebutuhannya dan memiliki aspirasi. Lalu dalam sebuah program pembangunan desa pun partisipasi masyarakat harus dilibatkan dan diikutsertakan didalamnya demi kebutuhan bersama. Sisi positif dari adanya partisipasi masyarakat dapat mendorong munculnya keterlibatan emosional terhadap program-program yang telah direncanakan.

Ketika melakukan pembangunan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakatnya, maka akan mendapatkan beberapa keuntungan. Keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pembangunan yang melibatkan partisipasi adalah (Parwoto, 1997, hlm. 25):

- a. Pembangunan akan lebih efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya
- b. Pembangunan lebih terasa hasil dan dampaknya ke masyarakat
- c. Masyarakat akan sadar dengan potensi yang mereka miliki dan persoalan yang mereka hadapi
- d. Masyarakat lebih bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan dan pemanfaatan hasil pembangunan tersebut
- e. Masyarakat saling belajar dalam proses pembangunan
- f. Akan tumbuhnya solidaritas diantara masyarakat itu sendiri

g. Akan tumbuhnya masyarakat mandiri yang mampu mengambil keputusan-keputusan untuk menentukan masa depan mereka.

Desa Cipetir merupakan salah satu Desa yang terletak di Kabupaten Kuningan bagian timur, tepatnya di Kecamatan Lebakwangi. Berdasarkan data dari website resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan, jumlah penduduk Desa Cipetir sebesar 2.712 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.348 berjenis kelamin laki-laki, dan 1.364 berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan hasil wawancara sebagai studi pendahuluan yang dilakukan pada hari Senin, 30 Maret 2020 pukul 10.00 - 10.30 WIB dengan Masta Nurasa, SE selaku Ketua Karang Taruna Desa Cipetir, beliau menjelaskan bahwa mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Cipetir adalah petani, permasalahan yang dialami Desa yaitu tingkat pendidikannya yang masih menengah ke bawah dan mayoritas masyarakatnya kurang memiliki kesadaran untuk ikut andil dalam pembangunan SDM. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan khususnya pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Berkaitan dengan pelaksanaan PKH, desa ini merupakan salah satu desa yang tersentuh oleh program tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Program Keluarga Harapan yang disingkat menjadi PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin dan diolah datanya oleh pusat dasar informasi kesejahteraan sosial serta ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Program Keluarga Harapan merupakan program nasional yang telah diimplementasikan sejak tahun 2007 dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan upaya kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, serta memutuskan rantai kemiskinan.

Melalui program ini, masyarakat diberikan stimulasi dari pemerintah dan diharapkan agar masyarakat mampu bergerak untuk melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan berpartisipasi dalam pembangunan di Desa. Dalam

Laila Puspaningrum, 2020

HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KORELASIONAL DI DESA CIPETIR KECAMATAN LEBAKWANGI KABUPATEN KUNINGAN)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memanfaatkan bantuan dana dari pemerintah tersebut, tentu dibutuhkan partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan di Negara ini serta merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Desa, pembangunan Desa diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 68 masyarakat desa berkewajiban untuk:

- a. membangun diri dan memelihara lingkungan desa
- b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik
- c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di desa
- d. memelihara dan mengembangkan nilai musyawarah, mufakat, kekeluargaan dan gotong royong di desa
- e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan sebagai studi pendahuluan pada hari Selasa, 30 Maret 2020 pukul 09.30 - 10.00 WIB dengan Ibu Nuryanti, S.Pd selaku pendamping Program Keluarga Harapan, beliau menjelaskan bahwa sebagai wujud dari pelaksanaan pembangunan di Desa Cipetir, saat ini pemerintahan Desa Cipetir telah melaksanakan pembangunan melalui pemberdayaan masyarakatnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. Hal tersebut dilihat dari meratanya pembagian sembako kepada penerima PKH yang dilakukan pada tanggal 30 Maret 2020 pada pukul 13.00 – 14.30 WIB, masyarakat Desa Cipetir juga diberi peluang untuk berpartisipasi aktif pada setiap tahap pembangunan yang dilaksanakan.

Sebagai salah satu desa yang menerima dan memanfaatkan dana pemerintah pada program keluarga harapan, pemerintah desa mengalokasikan dana tersebut untuk pemberdayaan masyarakat. Contoh keberhasilan pembangunan tersebut yaitu terciptanya peluang usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang dapat meningkatkan status ekonomi keluarga penerima manfaat, yang mana permodalan itu sendiri berasal dari bantuan dana PKH. Atas dasar inilah kesadaran dari masyarakat perlu terus di tumbuhkan dan ditingkatkan sehingga nantinya partisipasinya akan dirasakan sehingga suatu kewajiban yang lahir secara

Laila Puspaningrum, 2020

HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI KORELASIONAL DI DESA CIPETIR KECAMATAN LEBAKWANGI KABUPATEN KUNINGAN)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

spontan untuk membantu pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan khususnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) desa Cipetir juga dalam pendidikan, anak-anak dari keluarga penerima manfaat (KPM) sudah mendukung program ini dengan melaksanakan kewajiban belajar 12 tahun agar kualitas sumber daya manusia (SDM) di desa menjadi lebih baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana hubungan partisipasi masyarakat penerima program keluarga harapan dengan pembangunan sumber daya manusia di desa Cipetir. Pembatasan masalah diperlukan peneliti, agar penelitian yang dilakukan baik dalam mencari data-data di lapangan maupun dalam menganalisis data lapangan yang telah terkumpul tersebut memiliki arah yang jelas, sehingga peneliti tidak menyimpang dalam mencari jalan pemecahannya dan menarik suatu kesimpulan dari arah yang telah ditentukan. Dari permasalahan di atas maka penulis membatasi permasalahan ini dengan mengangkat tema atau judul penelitian sebagai berikut **“HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DENGAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (Studi Korelasional di Desa Cipetir Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan)”**

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut,

1. Seberapa besar partisipasi masyarakat penerima program keluarga harapan dalam mendukung program keluarga harapan?
2. Seberapa besar program keluarga harapan mendorong pembangunan sumber daya manusia?
3. Bagaimana hubungan antara partisipasi masyarakat penerima program keluarga harapan dengan pembangunan sumber daya manusia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui partisipasi masyarakat penerima program keluarga harapan dalam mendukung program keluarga harapan
2. Mendeskripsikan program keluarga harapan mendorong pembangunan sumber daya manusia
3. Menganalisis hubungan antara partisipasi masyarakat penerima program keluarga harapan dengan pembangunan sumber daya manusia

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, adapun manfaatnya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut, yaitu:

1. Manfaat dari Segi Teori

Melalui penelitian ini, mampu memperkuat teori atau konsep baik pembangunan maupun partisipasi masyarakat bagi peneliti dalam hal memberdayakan dan membangun masyarakat melalui program keluarga harapan.

2. Manfaat dari Segi Kebijakan

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi kebijakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan program keluarga harapan sangat berpengaruh dalam meningkatkan sumber daya manusia, sehingga akan tercipta kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

3. Manfaat dari Segi Praktik

Melalui penelitian ini diharapkan para pendamping program keluarga harapan mampu memiliki kejujuran dan semangat yang tinggi untuk terus menyalurkan bantuan program keluarga harapan sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

4. Manfaat dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menggerakkan hati masyarakat terutama penerima bantuan program keluarga harapan untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan desa agar tujuan dari pembangunan dapat tercapai dengan maksimal.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur Organisasi dalam penulisan dalam skripsi ini yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.

BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini memaparkan kajian pustaka yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian ini, dan membahas teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti mengarahkan pembaca untuk mengetahui bagaimana peneliti merancang alur penelitiannya, untuk itu pada bab ini isinya menjelaskan desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian dan prosedur penelitian.

Bab 4 TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi temuan hasil penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data berdasarkan rumusan masalah, dan menjelaskan bahasan temuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

Bab 5 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini berisi peneliti menyajikan pemaknaan dan penafsiran terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang bermanfaat dari hasil penelitian tersebut. Dalam bab ini peneliti menyimpulkan hasil penelitiannya dari awal permasalahan sampai penelitian dilakukan berikut cara-cara untuk melakukan penelitian tersebut.